

**PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*
(ICRC) DALAM MENGATASI MASALAH KEMANUSIAAN DI ACEH
TAHUN 2004-2006**

**Oleh :
HANY RAFIKA¹
(hara5pink@gmail.com)**

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si

Bibliografi: 20 Jurnal dan/atau *Working Papers*, 30 Buku, 9 Dokumen dan
Laporan Resmi, 10 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is analysing about the role of International Committee Red Cross (ICRC) to implementating Humanitarian Law beside it jobs to address the crisis that occured because of civil conflict or nature disaster in Aceh, Indonesia. Conflict in Aceh involving the Freedom Movement of Aceh (GAM). The ICRC is an impartial humanitarian organization, neutral and has a mission to protect the lives and dignity of victims of armed conflict, war and other situations of violence and provide aid and assistance in the form of materials or services. ICRC served in four types of situations such as: International Amed Conflict, Non-international Armed Conflict, Internal Disturbance, and Internal Tension. Humanitarian crisis that occurred in Aceh is a Freedom Aceh Movement (GAM) armed conflict and the tsunami disaster. GAM is a form of rebellion undertaken by the people of Aceh who want to be independent and irrespective of the State of Indonesia. The desire is triggered by a mismatch between the Acehnese people who tend to wear Islamic Sharia law and the Indonesian government tends to neo-colonial. Tsunami is the largest natural disasters in history. Begins with an earthquake measuring 9.1 to 9.3 on the Richter scale lasted 8-10 minutes and produce large waves and a deadly attack by 14 countries and killed as many as 230,000 people. This study discusses how the role of the ICRC in overcoming the crisis of natural disasters that occurred in the Aceh.

Keywords: *International Committee of The Red Cross, Aceh, Role, Humanitarian Crisis*

¹Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011

PENDAHULUAN

Khusus dalam penelitian ini memfokuskan mengenai peran sebuah organisasi non-permerintah dalam mengatasi masalah kemanusiaan pada situasi konflik bersenjata dan bencana alam, organisasi yang dimaksud adalah palang merah internasional atau yang disebut dengan *International Committee of The Red Cross* (ICRC). Organisasi ini berbasis di Jenewa Swiss pada tanggal 24 Juni 1863 yang didirikan oleh Henry Dunant dan awalnya bernama “Komisi Lima” dengan empat tokoh terkemuka lainnya dari keluarga terkenal Geneva, sebagai sebuah komisi penyelidikan dari Masyarakat Jenewa untuk kesejahteraan masyarakat.² Misi resmi ICRC adalah sebagai organisasi kemanusiaan yang tidak memihak, netral dan mandiri yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata, perang, dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberikan mereka pertolongan dan bantuan. ICRC melaksanakan tugas yang bersumber pada Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Gerakan, dimana bahwa tugas ICRC adalah:

1. Memantau kepatuhan para pihak yang bertikai pada konvensi Jenewa
2. Mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang
3. Mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang dan melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan perlawanan.
4. Membantu mencari orang hilang dalam konflik bersenjata
5. Mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil
6. Bertindak sebagai perantara netral antara pihak yang berperang

²D. Schindler dan J.Toman, 1988, *The Law of Armed Conflict*, Martinus Nihjoff Publisher, hal. 230-231

ICRC memiliki 2000 karyawan yang profesional dan sekitar 800 pekerja di kantor pusat di Jenewa dan 1.200 ekspatriat bekerja di lapangan. Sekitar setengah pekerja lapangan berfungsi sebagai delegasi mengelola operasi ICRC di negara-negara yang berbeda, dan separuh lainnya adalah spesialis tenaga ahli seperti dokter, ahli pertanian, insinyur dan lainnya. Dalam delegasi staf internasional dibantu diposkan sekitar 13.000 karyawan nasional sehingga jumlah staf di bawah otoritas ICRC berjumlah sekitar 15.000 karyawan. Delegasi juga sering bekerja sama dengan palang merah nasional perhimpunan di negara tempat mereka berada.³

PEMBAHASAN

Misi umum ICRC adalah untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata dan situasi gangguan dalam negeri, sipil maupun militer, secara netral dan tidak memihak. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata ICRC juga mempunyai misi untuk mempromosikan hukum humaniter internasional.⁴ ICRC telah menjalankan misinya dilebih dari 80 negara di dunia, tersebar di 27 negara di Afrika, 14 negara di Asia, 27 negara di Eropa dan Amerika, serta 12 negara di Timur Tengah dan Africa Utara.

Memberikan Perlindungan

Kegiatan perlindungan mencakup kunjungan ketempat-tempat penahanan dan pemulihan kembali hubungan keluarga. ICRC tidak membedakan korban dan konsisten dengan sikap netralnya dengan rutin melakukan kunjungan bagi tahanan-tahanan dan melakukan dialog rahasia dan konstruktif dengan pihak berwenang dan bertanggungjawab mengenai kondisi material dan pengobatan.

³ Muin, Umar, 1999. *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal: 31

⁴ Kenali ICRC, *loc cit.* Hal. 3

Memberikan Bantuan

Krisis kemanusiaan sering kali terjadi seiringan dengan krisis-krisis lainnya seperti kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan ekonomi. Sehingga dalam kondisi ini ICRC siap siaga berusaha menyediakan kebutuhan para korban berupa bantuan makanan dan obat-obatan serta pembuatan penyediaan air atau sarana medis.

Bekerjasama dengan Perhimpunan Nasional Negara

ICRC selalu menjalin kerjasama dengan perhimpunan negara manapun tempat beroperasi, tujuannya adalah untuk mempermudah pergerakan dan meningkatkan kemampuan perhimpunan-perhimpunan nasional dalam memenuhi tanggungjawab mereka dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di negaranya masing-masing. Kerjasama yang dilakukan adalah seperti memberikan pelatihan kepada staf kesehatan utama, ahli beda, dan teknisi lainnya.

Aceh memang dikaruniai dengan berbagai macam keistimewaan dan kekayaan alam—yang tragisnya juga mengundang pertikaian. Teristimewa adalah posisi geografisnya yang strategis, terletak di persimpangan jalan laut yang ramai, yang menghubungkan Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan. Tepat di persimpangan dua budaya besar dunia, India dan China. Potensial sebagai tempat *rendezvous* bagi para pelayar, sekaligus strategis sebagai sarang perompak untuk menghadang kapal-kapal kaya. Mengingat posisi Aceh yang berada di ujung barat nusantara, negeri ini juga menjadi gerbang pertama yang harus dilalui jamaah haji ketika berangkat ke tanah suci melalui jalur laut. Maka negeri ini pun sempat memiliki julukan yang terkenal sebagai Serambi Mekah.⁵

⁵ Sebagai contoh tulisan Nazaruddin Syamsuddin juga menggunakan istilah ini untuk menunjuk Aceh. Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949* (Jakarta: UI-Press, 1999)

Sejarah Dan Latarbelakang Lahir GAM

Umum menganggap bahwa GAM dilahirkan pada 4 Desember 1976. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada 20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih hari lahir GAM adalah pada tanggal yang disebut paling awal, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera.⁶ Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam.⁷

Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan, Hasan Tiro juga mengumumkan struktur pemerintahan Negara Aceh Sumatera. Akan tetapi, kabinet tersebut belum berfungsi hingga pertengahan 1977, persoalannya adalah karena para anggota kabinet pada umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. Sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di camp Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie. Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, yaitu: Presiden (Hasan Muhammad Tiro), Perdana Menteri (Dr. Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan (Muhammad Usman), Menteri Pekerjaan Umum (Ir. Asnawi Ali), Menteri Perhubungan

⁶ Ikhar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* hal.13

⁷ Moch. Nurhasim, 2008. *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar. Hal.64-66

(Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Dr. Zubir Mahmud) dan Menteri Penerangan (M. Tahir Husin).⁸

GAM merupakan lanjutan perjuangan—atau setidaknya terkait—Darul Islam (DI) Aceh yang sebelumnya pernah meletus pada 1950-an. Tesis ini, didukung oleh Isa Sulaiman yang menilai keterkaitan GAM dengan DI, karena persoalan DI tidak diselesaikan secara tuntas. Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang dibangun oleh Sukarno untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII Daud Beureueh.⁹ Namun, penulis menilai tesis ini lemah karena meski memiliki beberapa keterkaitan, tapi bukti bahwa GAM ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam sebagai dasar perjuangan dan lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu politiknya merupakan antitesis yang jelas menggugurkan pendapat ini.¹⁰

Kedua, faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak

memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh.¹¹

Memburuknya kondisi keamanan sipil di Aceh menyebabkan tindakan pengamanan keras diluncurkan pada tahun 2001 dan 2002. Megawati akhirnya pada masa jabatannya pada tahun 2003 meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri konflik dengan GAM untuk selamanya dan keadaan darurat dinyatakan di Provinsi Aceh. Menurut laporan *Human Rights Watch*, militer Indonesia kembali melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi ini seperti operasi sebelumnya dengan lebih dari 100.000 orang mengungsi di tujuh bulan pertama darurat militer dan pembunuhan di luar hukum yang umum. Konflik ini masih berlangsung hingga terjadinya bencana Tsunami yang tiba-tiba memporak-porandakan Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dan dengan otomatis membekukan konflik yang terjadi.

Tsunami

Tsunami merupakan peristiwa bencana alam terparah yang tak akan dilupakan masyarakat Aceh maupun dunia. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat dibawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat kesegala arah. Tenaga yang dikandung alam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam. Setara dengan kecepatan pesawat terbang. Ketinggian gelombang di laut dalam hanya sekitar 1 meter. Dengan demikian laju gelombang tidak terasa oleh kapal yang sedang berada di tengah laut. Ketika

⁸*Ibid.* hal.66

⁹*Ibid.* hal.63

¹⁰Edward Aspinall, *Sejarah Konflik Aceh*, hal.1, 2008(http://www.acehinstitute.org/resume_150607_edward_aspinall.htm)

¹¹ Kawilarang, Harry. 2008. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing. hal.156

mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam, namun ketinggiannya sudah meningkat hingga mencapai puluhan meter. Hantaman gelombang tsunami bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir pantai. Kerusakan dan korban jiwa yang terjadi karena tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya. Bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.

Peran ICRC Membantu Aceh dan PMI Mengatasi Tsunami

Selama tiga minggu setelah terjadinya Tsunami, staf ICRC melakukan asesmen ke lebih dari 90 lokasi penampungan di Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe. Mereka dengan cepat melakukan asesmen, yang langsung dilanjutkan dengan distribusi makanan dan bantuan kemanusiaan non-makanan yang terdiri dari perlengkapan kebersihan, pakaian dan bahan dasar rumah tangga serta bahan-bahan penampungan lainnya. Atas kerjasama ICRC dan PMI, 122.310 pengungsi (24.462 Rumah Tangga) telah menerima non-pangan dalam bentuk kebutuhan dasar kebersihan, pakaian, pakaian dalam, peralatan memasak, tenda, terpal, tikar, selimut dan perlengkapan untuk bayi (perlengkapan keluarga). Antara tanggal 6 dan 13 Januari 2004, ICRC bekerjasama dengan PMI mendistribusikan makanan untuk kebutuhan selama satu minggu (beras, mie, minyak goreng, ikan kaleng, garam, gula, susu bubuk, dan biskuit) kepada total 50.266 pengungsi (11'086 Rumah Tangga). 500 perlengkapan kebersihan dirakit dan didistribusikan di 90 lokasi penampungan. ICRC memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan telah sesuai dengan kebutuhan para pengungsi, seperti

pemulihan diri, kebersihan dan peralatan untuk mata pencaharian.¹²

Segera setelah tsunami, ICRC menyediakan bahan, logistik dan dukungan keuangan untuk kegiatan PMI. Awalnya, PMI terfokus pada mengevakuasi barang bantuan mati dan mendistribusikan. Komponen lain dari Gerakan juga telah beroperasi di provinsi Aceh sejak tsunami. Ini termasuk Federasi Internasional Palang Merah dan banyak Nasional dan Bulan Sabit Merah. Sampai saat ini, lebih dari 90 proyek yang bertujuan mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi PMI telah disetujui dalam Kerangka Koordinasi Gerakan. Beberapa 25 Palang Merah Nasional dan Bulan Sabit Merah serta Federasi Internasional, ICRC dan PMI telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program, misalnya, merehabilitasi layanan ambulans PMI; mengatur dukungan psikososial; mengembalikan pasokan air; merekonstruksi rumah, sekolah dan pusat kesehatan; dan merehabilitasi infrastruktur PMI dan meningkatkan kapasitas tanggap darurat.¹³

PMI, Federasi dan ICRC telah ditandatangani, atas nama seluruh Gerakan, perjanjian dengan yang baru terbentuk badan pelaksana pemerintah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias. Perjanjian tersebut menegaskan komitmen Gerakan untuk memberi masyarakat Aceh dengan nilai \$ 600,000,000 'dukungan dalam berbagai sektor. Hal ini dilihat sebagai langkah penting dalam posisi Gerakan sebagai pemain kunci dalam pemulihan dan rehabilitasi tahap operasi tsunami.

Peran ICRC dan Pemerintah Aceh Mengatasi Masalah GAM

Dalam kaitannya untuk melindungi manusia dalam situasi konflik, atau kekerasan bersenjata, misi ICRC ialah untuk memperoleh penghormatan

¹² *Ibid*

¹³ PMI, PMI Bersiap Membantu Perdamaian Dunia http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=360 diakses pada 11 Agustus 2015

sepenuhnya terhadap isi dan jiwa HHI. ICRC berupaya untuk:

- i. Memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam itu.
- ii. Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap mereka.
- iii. Mengupayakan agar hak-hak mereka diperhatikan dan suara mereka didengar.
- iv. Memberi mereka bantuan.

Dalam konflik bersenjata non-internasional dan situasi kekerasan dalam negeri, KJ 1949 (pasal 3) dan Anggaran Dasar Gerakan memberi ICRC wewenang untuk menawarkan pelayanan kunjungan tahanan.¹⁴ Banyak pemerintah mengizinkan ICRC melakukan hal tersebut.

Peran ICRC dalam pembebasan sandera sangat tampak dalam peristiwa bebasnya Ferry Santoso yaitu juru kamera *RCTI* yang waktu itu meliput. Dalam pengakuannya dengan wartawan *TEMPO*, Ishak Daud, yaitu Panglima GAM di wilayah Peurelax yang akhirnya membebaskan Ferry setelah selama hampir setahun membiarkannya terlunta-lunta di hutan tempat Ferry dan yang lainnya disandera.

KESIMPULAN

Meskipun landasan hukum baik dalam lingkup internasional maupun nasional mengenai perlindungan kemanusiaan telah dibuat, namun dalam realitasnya, berbagai peraturan hukum tentang kemanusiaan tersebut masih belum diimplementasikan sebagaimana mestinya. Terkait isu kemanusiaan yang dipaparkan sebelumnya, respon yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah sepantasnya untuk dilakukan (sudah tepat). Namun, untuk beberapa tahap penyelesaian, pemerintah Republik Indonesia masih lebih cenderung menggunakan tindakan di jalur militer

yang sebenarnya menurut pandangan penulis merupakan tahap yang paling akhir untuk ditempuh. ICRC sebagai organisasi internasional yang independen di bidang kemanusiaan telah menunjukkan berbagai perannya dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan HAM baik dalam kondisi perang, konflik, bencana, maupun dalam kondisi normal. Berbagai tindakan riil yang telah diambil yaitu dengan melakukan berbagai seminar, workshop, diskusi, peluncuran buku, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya (operasi katarak, kunjungan ke berbagai tahanan, dan lain-lain) demi memajukan dan menyebarluaskan penghormatan HAM, khususnya dalam Hukum Humaniter Internasional. Kegiatan ICRC tentu saja tidak dapat dilaksanakan tanpa kerja sama dengan berbagai Perhimpunan Nasional, pemerintah, LSM, dan komunitas-komunitas lain. Selain itu, kegiatan ICRC tidak hanya ditujukan ke angkatan bersenjata, tapi juga ke pelajar, bahkan masyarakat umum.

Selain bekerja sama dengan pihak berwenang di Indonesia, ICRC juga melakukan berbagai kegiatan lainnya dengan Perhimpunan Nasional Indonesia (dikenal dengan Palang merah Indonesia/PMI). Berbagai bantuan kemanusiaan telah dilakukan dan diberikan oleh ICRC melalui koordinasi dengan PMI. Bantuan kemanusiaan operasi Pembebasan Sandera di Aceh dalam konflik bersama GAM, memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban konflik baik secara materi maupun jasa, menjadi mediator yang netral, penanggulangan bencana tsunami di Aceh melalui program yang disebut *Restoring Family Links*, dan lain-lain juga turut dilaksanakan oleh ICRC bekerja sama dengan PMI. Selain kunjungan ke tahanan, memeriksa kesehatan lingkungan penjara, sanitasi, makanan, dan kesehatan tubuh tahanan. Bantuan lain yang juga diberikan oleh ICRC juga berupa seminar, workshop, diskusi, lomba debat, *International Humanitarian Law Moot Court*

¹⁴ ICRC. Kunjungan Kepada Tahanan. 2008

Competition (IHL MCC), dan berbagai kegiatan lainnya untuk mempromosikan HHI baik kepada pasukan TNI, POLRI, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Schindler dan J.Toman, 1988, *The Law of Armed Conflict*, Martinus Nihjoff Publisher
- Muin, Umar, 1999. *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- ICRC, Kenali ICRC
- Syamsuddin, Nazaruddin *Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949* (Jakarta: UI-Press, 1999)
- Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*
- Moch. Nurhasim, 2008. *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar.
- Edward Aspinal, *Sejarah Konflik Aceh*, 2008
(http://www.acehinstitute.org/resume_150607_edward_aspinal.htm)
- Kawilarang, Harry. 2008. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing. hal.156
- PMI, PMI Bersiap Membantu Perdamaian Dunia
http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=360 diakses pada 11 Agustus 2015
- ICRC. Kunjungan Kepada Tahanan. 2008